

Bandoeng Tempo Doeloe: Perubahan Sosial di Bandung Dalam Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945

Devi Olivia, M. Hasmi Yanuardi, Sri Martini
Universitas Negeri Jakarta

deviolivia939@gmail.com, mhasmiyanuardi30@gmail.com, sr martini7271@gmail.com

Abstract

Bandung is one of the regions in West Java that has been established for a very long time. Various periods have been passed by the Bandung area ranging from ancient times, royal periods, colonial periods, movement periods, to the present day. In line with the passage of time that Bandung has passed, various social changes have arisen that were felt by the people of Bandung at that time. One of the social changes that was felt by the people of Bandung was during the colonial period until the independence period. This is what moved researchers to conduct research with the aim of researching how much change and impact the people of Bandung felt at that time. The methodology used in this study is literature studies such as books, articles, and so on. These sources are related to or in line with the situation or condition of the people of Bandung during the transition period of colonialism and independence. The result of this study is how Bandung is depicted during the Netherlands occupation, the Japanese occupation period, and the Independence period in terms of social changes and their impact on society.

Keywords : social changes, Bandung, Netherlands, Japanese

Abstrak

Bandung merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang telah berdiri sudah sangat lama. Berbagai masa telah dilalui oleh wilayah Bandung mulai dari masa purba, masa kerajaan, masa kolonial, masa pergerakan, hingga masa kini. Selaras dengan perjalanan waktu yang telah dilalui Bandung tersebut, timbul berbagai perubahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat Bandung kala itu. Perubahan sosial yang salah satunya sangat dirasakan oleh masyarakat Bandung ialah pada masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Hal ini yang membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk meneliti seberapa besar perubahan dan dampak yang dirasakan masyarakat Bandung kala itu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti buku, artikel, dan lain sebagainya. Sumber-sumber tersebut berkaitan atau sejalan dengan bagaimana situasi atau keadaan masyarakat Bandung pada masa peralihan penjajahan dan kemerdekaan. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran Bandung pada masa pendudukan Belanda, Masa pendudukan Jepang, dan masa Kemerdekaan dari segi perubahan sosial dan dampaknya untuk masyarakat.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Bandung, Belanda, Jepang

PENDAHULUAN

Perubahan Sosial bagi sebagian para ahli memiliki pengertiannya masing-masing, seperti menurut Selo Soemardjan perubahan Sosial diartikan oleh beliau sebagai budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Perubahan sosial akan secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Menurut ahli sosiologi lain seperti William F. Ogburn mengartikan perubahan sosial sebagai penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadi perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Contoh dari perubahan sosial tersebut adalah kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Secara umum perubahan sosial dapat diartikan sebagai bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang kecil atau besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Masyarakat inilah yang kemudian akan menghadapi faktor-faktor terjadi perubahan hingga mengalami perubahan sosial itu sendiri. Setiap manusia memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas, wajar jika manusia terus berkembang dan melakukan banyak perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Budi & Soerjono, 2017).

Bidang sosial menjadi bidang kehidupan yang berdampak besar dan berpengaruh selama periode peralihan kekuasaan di Indonesia khususnya di Bandung. Beberapa contoh perubahan sosial yang tampak pada masa peralihan di Bandung adalah perubahan sosial dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan aspek perubahan sosial lainnya. Maka dari itu, peneliti berupaya menelaah mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Bandung dan bagaimana dampak dari perubahan sosial

tersebut di dalam kehidupan masyarakat Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai kondisi perubahan sosial masyarakat Bandung pada masa peralihan kekuasaan yang terjadi secara terus-menerus di wilayah tersebut, yang mana mengkaji pula mengenai dampak dari perubahan yang terjadi di masa itu.

Objek kajian dari penelitian ini menitikberatkan pada wilayah Bandung di masa peralihan kekuasaan Belanda ke pendudukan Jepang dan terakhir ke pemerintahan Indonesia, karena Bandung merupakan salah satu wilayah strategis dan relatif memiliki jarak yang cukup dekat dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, Bandung juga menjadi wilayah dengan aktivitas kegiatan sosial yang cukup berpengaruh. Namun, keadaan sering mengalami perubahan karena dihadapkan oleh kondisi pemerintahan yang saat itu tidak stabil di Bandung. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan peranan dalam kegiatan sosial, maka tidak heran jika Bandung menjadi salah satu wilayah yang cukup berpengaruh saat itu. Dalam artikel ini, membahas mengenai keterkaitan antara aktivitas dan beberapa kebijakan dengan kehidupan sosial masyarakat Bandung pada masa peralihan kekuasaan Belanda ke pendudukan Jepang dan terakhir ke pemerintahan Indonesia dengan rentang tahun 1942–1945 yang mana mengkaji mengenai kebijakan yang dibuat pada masa kekuasaan Belanda, pendudukan Jepang, dan pemerintah Indonesia terkait kehidupan sosial masyarakat Bandung seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, dan kebijakan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana kehidupan sosial masyarakat Bandung sebagai dampak dari beberapa kebijakan sosial yang telah dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan sosial masyarakat Bandung pada masa kekuasaan Belanda, pendudukan Jepang, dan pemerintahan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Dalam metode studi kepustakaan, terdapat beberapa tahapan penelitian, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber yang diperoleh antara lain sumber primer seperti, surat kabar dan majalah, serta sumber sekunder seperti buku dan artikel. Sumber primer yang digunakan antara lain surat kabar *Tjahaja* dan *Suara Merdeka*, serta majalah *Kan Po* yang terbit di tahun 1942 hingga 1945 yang tersedia dalam bentuk mikro film. Sedangkan untuk sumber sekunder, menggunakan beberapa buku seperti *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe* karya Haryoto Kunto, Bandung Citra Sebuah Kota "*Bandoeng Beeld Van Een Stad*" Karya Robert Voskuil P.G.A., dan lain sebagainya. Sumber-sumber tersebut berkaitan atau relevan dengan bagaimana situasi dan keadaan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial di masing-masing masa pendudukan, khususnya di wilayah Bandung.

Semua sumber yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan kritik atau verifikasi, baik kritik *ekstern* maupun *intern*. Tahap kritik sumber yang dilakukan meliputi segi akurasi, kesesuaian, keterbaruan, kebenaran, dan keaslian sumber yang diperoleh. Untuk sumber primer, kritik ekstern dilakukan dengan melihat tahun dan bahasa yang digunakan dalam sumber tersebut untuk memastikan autentisitas sumber. Sedangkan untuk kritik intern, dilihat kesesuaian antara isi sumber dengan keadaan yang sebenarnya untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas sumber. Setelah dilakukan kritik atau verifikasi sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi di mana sumber-sumber yang telah dikritik selanjutnya akan dianalisis dan dijabarkan secara komprehensif menjadi fakta sejarah. Fakta yang telah diinterpretasi tersebut menjadi bahan yang digunakan untuk tahap penulisan yang tersusun secara sistematis, isi yang logis dan dapat dipahami, serta jelas tujuan dan kesesuaiannya dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif naratif dalam bentuk historiografi.

Kondisi Wilayah Bandung dan Masa Akhir Kekuasaan Belanda di Bandung (Januari-Maret 1942)

Bandung di tahun 2023 merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini berdiri sejak 25 September 1810. Herman Willem Daendels yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1000 km demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa. Pembangunan Jalan Raya Pos dilakukan oleh rakyat pribumi dibawah pimpinan para bupati didaerah masing-masing.

Tahun 1809, Daendels datang meninjau pembangunan Jalan Raya Pos, dan tiba disebuah titik yang menurutnya sangat baik bila disana berdiri sebuah kota. Titik yang ditunjuk oleh Daendels itu sekarang dibangun monumen yang sering disebut titik 0 km. Monumen ini berada di depan Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, kurang lebih 50 m seberang Hotel Savoy Homann.

Tanggal 25 Mei 1810, Daendels memerintahkan Bupati Bandung kala itu untuk memindahkan ibukota kabupaten dari Krapyak ke daerah Cikapundung. Tanpa Daendels ketahui, bahwa jauh sebelum *besluit* mengenai pembangunan Jalan Raya Pos itu keluar, R. A. Wiranatakusumah II selaku Bupati Bandung yang kemudian dikenal sebagai *the founding father* Kota Bandung sudah merencanakan pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung, Beliau telah menetapkan sebuah lahan kosong berupa hutan yang terletak di tepi barat Sungai Cikapundung dan tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (alun-alun pusat Kota Bandung sekarang) sebagai tempat yang cukup baik dan

strategis untuk pusat pemerintahan. Alasan pemindahan ibukota sendiri dikarenakan Krapyak yang tidak strategis lagi sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. Krapyak yang sekarang lebih dikenal sebagai daerah Dayeuhkolot sampai tahun 2022 masih sering diterjang banjir entah itu saat hujan besar bahkan saat hujan intensitas kecil.

Pemindahan ibukota kabupaten sudah dimulai akhir tahun 1808 atas prakarsa R. A. Wiranatakusumah II. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan *Besluit* Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 25 September 1810. Tanggal ini pula yang dijadikan sebagai hari jadi Kota Bandung yang diperingati setiap tahunnya (Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, 2004).

Kota Bandung di awal pembentukannya tidak banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Baru setelah Bandung ditetapkan sebagai Ibukota Keresidenan Priangan pada tahun 1864 menggantikan kedudukan Cianjur, secara perlahan terjadi perubahan yang cukup berarti pada tampilan Kota Bandung. Keberadaan Kota Bandung sebagai pusat politik pemerintahan Keresidenan Priangan ini kemudian diikuti pula oleh keberadaannya sebagai sentra produksi industri perkebunan besar di Priangan. Pembangunan kota Bandung hingga akhir abad ke-19 semua tampak difokuskan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan Kota Bandung, baik sebagai pusat kegiatan politik maupun pusat kegiatan ekonomi.

Memasuki abad ke-20, sebuah perubahan mendasar kembali dialami Kota Bandung. Berdasarkan ordonansi tanggal 21 Februari 1906, Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai sebuah otoritas lokal (*gemeente*). Peresmian sekaligus penetapan Bandung sebagai sebuah otoritas lokal dilakukan oleh Gubernur Jenderal J. B. Van Heutzs pada tanggal 1 April 1906. Pendirian otoritas lokal Bandung meliputi dua wilayah kecamatan (*onderdistrict*), yaitu kecamatan Bandung Kulon (Barat) dan Bandung Wetan (Timur). Kecamatan Bandung Kulon memiliki 8 desa yakni Andir, Citepus, Pasar,

Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astana Anyar, dan Regol. Kecamatan Bandung Timur memiliki 6 desa yakni Balubur, Kejaksan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gemuruh. Bandung sejak berstatus Otoritas Lokal semakin mempunyai peranan penting dalam kegiatan politik dan ekonomi pemerintah Kolonial Belanda. Bandung pun tampil sebagai primadona tempat peristirahatan orang-orang barat, khususnya Belanda. Berbagai prasarana dan sarana penunjang bagi sebuah kota modern kemudian banyak dibangun di Kota Bandung. Realitas yang tidak jauh berbeda tetap berlangsung saat Bandung memasuki masa kemerdekaan. Status Bandung sebagai kota pusat pemerintahan mengalami peningkatan saat kota ini ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat, menggantikan sementara kedudukan Jakarta (Kunto, 1984).

Bandung sejak menjadi Kotapraja bersemangat bekerja membangun kelembagaannya melalui pendidikan, terutama pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat Bandung yang pada awalnya masih berpikiran kolot (kuno) menjadi berpikiran terbuka terhadap segala hal termasuk masalah pendidikan. Tahun 1931 terdapat lebih 116 lembaga pendidikan yang terkait dengan sekitar 2.200 murid dan mahasiswa, dan pada tahun 1940 jumlah murid meningkat sampai 26.000 orang dengan lembaga pendidikan menjadi 178. Sekolah-sekolah dasar reguler dibagi dalam 4 golongan, yaitu sekolah Eropa, sekolah Belanda-Pribumi, sekolah Pribumi, dan sekolah Belanda-Cina (*Europesche School, Hollands-Inlandsche School, Inlandsch School, dan Hollandsch-Chinese School*). Terdapat pula sekolah yang mendapat subsidi, misalnya perkumpulan Taman Siswa. Tingkat pendidikan lanjutan, sebelum perang terdapat sembilan sekolah: *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) (setara SMP sekarang), dua *Gymnasium*, satu *Algemene Middelbare School* (AMS) (setara SMA sekarang), tiga *Hogere Burger School* (HBS) (sekolah lanjutan lima tahun), dua *Kweekschool* (sekolah guru), lima *Vakschool* (sekolah kejuruan), tiga *Nijverheidsschool*

(sekolah kejuruan industri/kerajinan), tiga *Handelschool* (sekolah dagang), dan satu *Muziekschool* (sekolah musik).

Organisasi-organisasi pun mulai bermunculan disamping keberadaan sekolah di wilayah Jawa Barat terkhususnya di Bandung. Timbulnya beragam organisasi ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan pemikiran masyarakat Bandung kala itu. Istri Sedar merupakan contoh organisasi yang muncul di Bandung yakni pada tanggal 22 Maret 1930 sebagai sebuah organisasi wanita yang selanjutnya sampai saat ini menjadi organisasi Putri Indonesia. Perkembangan selanjutnya, pertumbuhan organisasi kebangsaan di Jawa Barat terutama di Bandung semakin gencar menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Keadaan ini berlangsung sampai pecahnya Perang Pasifik 7 Desember 1941.

Akibat beberapa perubahan mendasar tersebut berpengaruh juga ke kehidupan masyarakat di wilayah Bandung. Masyarakat Bandung pada awalnya memiliki gaya hidup yang konvensional dan mengikuti adat istiadat yang berlaku diwilayahnya. Kejadian berubah saat bangsa Belanda masuk ke Indonesia khususnya wilayah Bandung, mereka langsung menyebarkan gaya hidup yang moderen dan mewah secara perlahan. Bisa dilihat dari gaya berpakaian masyarakat Bandung sebelum bangsa Belanda datang masih menggunakan setelan kebaya untuk kaum perempuan dan pakaian pangsi untuk kaum pria. Kebiasaan itu berubah setelah bangsa Belanda datang, sebagian gaya berpakaian masyarakat Bandung mulai berubah terutama yang berada di kalangan bangsawan. Kaum wanita menggunakan gaun mewah sedangkan kaum pria menggunakan setelan Jas untuk menghadiri acara resmi dan untuk kegiatan sehari-hari kaum wanita menggunakan kaos atau blus yang dipadu padankan dengan celana panjang atau rok selutut sedangkan kaum pria menggunakan kaos atau kemeja yang dipadu padankan dengan celana panjang atau celana selutut. Mata pencaharian masyarakat Bandung juga ikut berubah yang awalnya pekerjaannya tak jauh dari

berkebun, pegawai pemerintahan biasa, pelaku seni, dan lain sebagainya. Semenjak bangsa Belanda masuk ke Bandung, pekerjaan masyarakat Bandung mulai bervariasi mulai dari pegawai hotel, pelayan restoran, pegawai pabrik, dan pekerjaan lainnya yang mereka bawa dan di adaptasikan ke kehidupan masyarakat Bandung pada masa itu (Salamah, 2017).

Segi pemerintahan, Bandung dipimpin oleh Bupati dan juga Walikota. Masa penjajahan Belanda tugas walikota harus dipegang oleh orang Belanda sedangkan tugas Bupati dipegang oleh rakyat pribumi. Walikota pertama Bandung adalah Bertus Coops yang merupakan keturunan Belanda. Seorang walikota pada mulanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Kota (*Exofficio*) dengan didampingi pembantu walikota yang terpilih berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak. Keberadaan Bupati di Bandung sudah ada sejak zaman pemerintahan Kerajaan Mataram. Tumenggung Wiraangunangun atau lebih dikenal dengan nama Ki Astamanggala dinobatkan oleh Kerajaan Mataram sebagai Bupati pertama Bandung. Menjabat selama kurang lebih 49 tahun, Ki Astamanggala akhirnya digantikan posisinya oleh Tumenggung Adikusumah sebagai Bupati baru pilihan pemerintah VOC. Runtuhnya Pemerintahan VOC membuat Tumenggung Adikusumah harus turun dari jabatannya sebagai Bupati yang telah beliau emban selama kurang lebih 23 Tahun dan posisinya digantikan oleh Tumenggung Anggadireja I sebagai Bupati pertama dalam masa Pemerintahan Belanda. Kejayaan Bandung bisa dikatakan mulai gemilang dimasa jabatan Bupati R. A Wiranatakusumah II, karena di masa jabatan beliau Ibukota dipindahkan dari Krapyak ke Kota Bandung serta mulai dibangunnya berbagai fasilitas penunjang lainnya. Baik Kedudukan Bupati maupun Walikota di masa Pendudukan Jepang dipegang sepenuhnya oleh rakyat pribumi. Walikota pertama Bandung pada masa pemerintahan Jepang ialah R.A. Atmadinata. Beliau Juga merupakan Walikota pertama dari kalangan Pribumi yang mampu menduduki kursi eksekutif di Bandung. Bupati pertama Bandung pada masa

pemerintahan Jepang ialah R.H.A.A. Wiranatakusumah V (Pemerintahan Kota Bandung, 2023).

Masa Pendudukan Jepang di Kota Kembang (8 Maret 1942-15 Agustus 1945)

Tanggal 1 Maret 1942, angkatan perang Jepang mendarat di Merak dan Teluk Banten, serta di Eretan, Indramayu yang dipimpin oleh Kolonel Shoji dengan sasaran untuk menguasai pangkalan udara Kalijati, Subang. Gerak maju angkatan perang Jepang ke daerah pedalaman Jawa Barat tidak dapat dibendung lagi. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia dapat dikuasai dan diganti namanya menjadi Jakarta. Hari itu juga kota Bogor, Cianjur, dan Sukabumi dapat dikuasai Jepang dengan mudah. Tanggal yang sama Tentara Jepang bergerak menuju Bandung melalui Ciater dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda di Lembang melalui Pertempuran Ciater. Tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh menandatangani *kapitulasi* (surat penyerahan) kepada pihak Jepang di Pangkalan Angkatan Udara Kalijati, Subang, Jawa Barat (Ricklefs, 2005).

Setelah menguasai wilayah Jawa Barat, Jepang mulai memasuki Kota Bandung. Mereka melakukan serangan ke wilayah Bandung dengan tujuan untuk menguasai pangkalan udara Kalijati, Subang, serta menghancurkan pasukan Belanda di wilayah tersebut. Serangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguasai wilayah Bandung dan menghancurkan pasukan Belanda di wilayah tersebut.

Setelah menguasai wilayah Bandung, Jepang mulai membentuk pemerintahan baru di wilayah tersebut. Mereka membentuk pemerintahan militer yang dipimpin oleh seorang komandan. Pemerintahan ini memiliki tujuan untuk menguasai wilayah Bandung dan menghancurkan pasukan Belanda di wilayah tersebut. Pemerintahan ini

juga memiliki tujuan untuk menghancurkan budaya barat dan kebudayaan masyarakat Bandung.

Jepang membentuk pemerintahan militer untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya, termasuk Bandung. Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan militer Jepang di Jawa Barat. Jepang menempatkan pejabat militer dan pasukan yang signifikan di Bandung. Kota ini dianggap strategis karena lokasinya yang dekat dengan Batavia (Jakarta) dan daerah lainnya di Jawa Barat.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, hanya berlangsung sekitar tiga setengah tahun. Kedatangan Jepang ke Indonesia membawa serta slogan dan propaganda salah satunya slogan “Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap” (*Hakko Ichiu*) yang menyatakan bangsa Indonesia dan Jepang adalah serumpun. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia secara umum bercirikan penghapusan pengaruh Barat dari masyarakat Indonesia dan memobilisasi mereka untuk kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang membentuk pemerintahan militer untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya, termasuk Bandung. Kota Bandung menjadi pusat pemerintahan militer Jepang di Jawa Barat. Jepang menempatkan pejabat militer dan pasukan yang signifikan di Bandung. Kota ini dianggap strategis karena lokasinya yang dekat dengan Batavia (Jakarta) dan daerah lainnya di Jawa Barat.

Jepang membentuk badan-badan khusus untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Bandung. Contohnya adalah Badan Penyelidik Usaha Perindustrian (BPUP) yang mengatur sektor industri. Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang eksploitatif di Bandung. Mereka memobilisasi tenaga kerja untuk kerja paksa (*Romusha*), memeras sumber daya alam, dan menerapkan sistem ekonomi perang (Pratama, 2018).

Romusha merupakan salah satu kegiatan Jepang pada masa pendudukan Indonesia. *Romusha* adalah salah satu gerakan sosial Jepang yang mencoba mempertemukan pekerja paksa laki-laki melalui komite yang disebut *Rumokiaki*. Jepang ketika tiba di Indonesia mengakui bahwa daerah ini merupakan bekas jajahan Belanda, dan Indonesia kaya akan sumber daya seperti minyak bumi, kina, besi, batu bara, dan karet. Begitu Jepang mengusir Belanda dari Indonesia, mereka memikirkan strategi untuk melestarikan dan melindungi kekayaan tersebut. Kegiatan tersebut memerlukan infrastruktur yang baik dan tenaga kerja yang besar. Tujuan dari *Romusha* tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Perekrutan pada kegiatan ini awalnya didasari dengan judul patriotik, yang menyiratkan kesetiaan kepada bangsa Indonesia yang “direncanakan kemerdekaannya”. Beberapa laki-laki Indonesia menjadi sukarelawan, sementara yang lain terpaksa mengikuti kamp pelatihan. Mereka awalnya dijanjikan makanan enak, perumahan layak, perawatan kesehatan, dan gaji bagus. Kamp tersebut dikelola oleh WNI sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berubah ketika Jepang mengirim mereka bekerja jauh dari desa mereka. Tempat kerja mereka sangat jauh, dan mereka dikirim tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri, termasuk Jepang. Mereka tidak mempunyai hak untuk tidur di tempat yang layak, tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan meskipun mengidap penyakit menular, dan beban kerja yang sangat berat. Beberapa menolak dan mencoba melarikan diri, namun dipukuli oleh pasukan Jepang (Kurasawa & Nanke, 2018).

Jepang selain menerapkan sistem kerja paksa yang diterapkan di Bandung dalam kebijakan ekonomi Jepang juga menerapkan Kebijakan Ekonomi Perang. Ekonomi perang adalah kebijakan suatu negara untuk mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menopang keperluan perang. Tujuan sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia terutama di Bandung adalah untuk memprioritaskan produksi

barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan Jepang dari serangan Sekutu. Ciri khas sistem ekonomi yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah pemusatan kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung perlengkapan perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Jepang menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian secara ketat agar tujuannya tercapai, yang meliputi: Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang, Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, sekaligus memonopoli penjualannya, Pembatasan produksi tanaman yang tidak menguntungkan perang, seperti teh, kopi, dan tembakau, Pemaksaan menanam padi, pohon jarak, dan kapas. Aturan pengendalian tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang No. 322/1942 yang menyatakan bahwa *Gunseikan* (kepala militer) ditugaskan untuk mengawasi secara langsung perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pelanggaran terhadap kebijakan Jepang tersebut akan dihukum dengan sanksi yang berat. Pabrik gula yang banyak dibangun pada masa pendudukan Belanda, dialihfungsikan sebagai pabrik senjata. Akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang, banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Jepang juga melakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektare (Pratama, 2018).

Jepang tak hanya menerapkan sistem ekonomi perang tetapi Jepang memberlakukan pula sistem ekonomi *autarki*. *Autarki* adalah sistem perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas yang dilakukan dalam suatu negara. Sistem ini diterapkan dengan tujuan agar setiap daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem ekonomi perang dan autarki membuat rakyat Indonesia menderita, karena masing-masing daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi segala bentuk kegiatan ekonominya difokuskan untuk kepentingan perang Jepang. Kebijakan Jepang di bidang ekonomi membuat kesejahteraan rakyat menurun, sebaliknya angka kematian terus naik (Oktorino, 2016).

Jepang menerapkan kebijakan pertanian yang ketat di Bandung dan sekitarnya. Petani diwajibkan menyetor hasil panen kepada Jepang dan menanam tanaman yang diperintahkan untuk kepentingan perang. Contohnya penerapan sistem *Nogyo Kumiai*. Memasuki tahun 1944, posisi Jepang mulai terdesak oleh Sekutu, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Agar sumber daya yang diterima pemerintah meningkat, Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui *Nogyo Kumiai*. *Nogyo Kumiai* adalah koperasi pertanian model Jepang, yang dipromosikan sebagai unit dasar untuk mengumpulkan hasil pertanian. Pembentukan *Nogyo Kumiai* merupakan cara Jepang melakukan eksploitasi secara intensif demi keuntungan pemerintah. Keberadaan *Nogyo Kumiai* membuat kehidupan rakyat semakin sulit, karena mereka dibebankan penyerahan 30 persen bahan makanan untuk pemerintah dan 30 persen untuk lumbung desa. Sedangkan 40 persen menjadi hak pemiliknya, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah sangat rendah (Fadli & Kumalasari, 2019).

Jepang mengubah sistem pendidikan di Bandung sesuai dengan kepentingan mereka. Kurikulum sekolah diubah untuk mengajarkan budaya dan ideologi Jepang. Penggunaan bahasa Jepang juga diwajibkan. Jepang menerapkan kebijakan keamanan yang ketat di Bandung. Mereka memberlakukan jam malam, sensor pers, dan larangan berkumpul. Pasukan patroli juga ditempatkan di seluruh wilayah untuk menjaga keamanan.

Jepang membentuk organisasi militer seperti Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho yang melibatkan masyarakat pribumi. Tujuannya adalah untuk membantu kepentingan perang Jepang dan mengontrol masyarakat. Pasukan militer Jepang agar menjaga tetap dalam kondisi mental yang baik, pihak Jepang juga membuat kebijakan hiburan pula untuk para anggota militernya dengan membentuk *Jugun Ianfu*. Pemerintah

Jepang membentuk wanita penghibur (*Jugun Ianfu*) untuk memberikan hiburan tingkat tinggi kepada tentara, yang membantu meningkatkan moral dan kinerja mereka. Mereka dipaksa menjadi budak seks dan dijadikan *jugun ianfu* setiap hari tanpa bayaran. Tujuan diperkenalkannya *jugun ianfu* oleh pemerintah Jepang adalah untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin di kalangan tentara Jepang, seiring perkembangannya banyak perempuan yang akhirnya dipekerjakan secara paksa untuk dijadikan budak seksual. Pelanggan banyak yang memperlakukan mereka dengan kasar dan tidak manusiawi, dan juga meninggalkan mereka dalam kondisi yang menyedihkan (Oktorino, 2016).

Jepang juga melakukan kebijakan propaganda secara masif di Bandung untuk menanamkan ideologi Jepang dan membangun citra sebagai "saudara tua" yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang juga menerapkan Propaganda "3A" yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Propaganda ini membuat Pemerintahan Jepang selalu dianggap baik di mata para penduduk Indonesia terutama masyarakat Bandung. Kebijakan-kebijakan Jepang ini bertujuan untuk mengontrol dan mengeksploitasi wilayah Bandung demi kepentingan perang mereka. Kebijakan-kebijakan tersebut di sisi lain juga memicu kebencian dan perlawanan dari masyarakat Bandung yang mendambakan kemerdekaan.

Pemerintahan Militer Jepang mulai membuat beberapa undang-undang serta peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua masyarakat Bandung dan juga orang Belanda yang masih mendiami wilayah Bandung setelah Jepang berhasil mengambil alih Bandung dari tangan Belanda. Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Militer Jepang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasan dari berbagai sektor seperti contohnya pembatasan gelombang pesawat radio, pembatasan pengiriman uang ke Negara Jepang, dan pembatasan bersidang atau berkumpul serta pengawasan perusahaan kebun seperti kebun kopi, teh, karet, dan kina. Adanya peraturan yang

dibuat oleh Pemerintahan Militer Jepang membuat ruang gerak masyarakat Bandung dan orang Belanda pada masa itu semakin sempit. Peraturan untuk orang Belanda seperti agar tidak mempertunjukkan dirinya dan mengunjungi tempat umum. Adanya peraturan untuk orang Belanda dan Indo-Eropa untuk membungkukkan badan apabila bertemu bala tentara Dai Nippon membuat reputasi orang Belanda pada masa itu semakin terhina. Orang Eropa terutama perempuan dilarang memakai pakaian yang mewah dan larangan memakai celana panjang karena bertentangan dengan adat ketimuran sehingga peraturan ini berlaku pula untuk masyarakat Bandung pada masa itu. Adanya peraturan yang harus ditaati masyarakat Bandung pada saat itu yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia seperti membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Matahari atau yang sering disebut *Seikerei* (Kan Po, 1943).

Masuknya Jepang pada awal tahun 1942 ke Jawa Barat, segera mengubah susunan pemerintahan yang ada di wilayah ini. Di bawah Pemerintahan Militer Jepang, Provinsi Jawa Barat bentukan Belanda sebelumnya dihapuskan dan berdasarkan *Osamu Seirei* No.27 tahun 1942 ditetapkan bahwa daerah Jawa Barat dibagi menjadi 5 *shu* (keresidenan), yaitu Banten *Shu*, Bogor *Shu*, Jakarta *Shu*, Priangan *Shu* dan Cirebon *Shu*. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten) dan *shi* (kotapraja), sementara dibawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa) (Mansur, 2010).

Tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin. Kedatangan bala tentara Jepang pada awalnya memang mendapat simpati masyarakat Indonesia. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena kekayaan alam dan rakyat Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang melawan pasukan Sekutu. Kehidupan rakyat Indonesia pada umumnya semakin menderita. Banyak raykyat Indonesia

terkhususnya di Bandung dipekerjakan secara tidak layak dan tak diupah untuk melakukan Romusha membangun Gua Jepang dan bekerja diperkebunan untuk menanam tanaman yang diperuntukan untuk keperluan perang. Masyarakat Bandung juga dipekerjakan di beberapa pabrik milik Jepang seperti pabrik senjata dan pabrik medis dengan tanggungan pekerjaan yang berat dan upah yang sedikit. Dalam waktu yang tidak lama hal itu menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kelaparan, penindasan yang menimbulkan perasaan antipati terhadap Jepang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat yang kemudian menimbulkan perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Tanggal 8 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai lemah sejak itu dan akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945.

Kondisi Masyarakat Bandung Pada Awal dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia (Agustus-Oktober 1945)

Kekalahan Jepang dari sekutu menambah keyakinan rakyat Indonesia, bahwa tidak ada yang tidak dapat dikalahkan untuk merebut kemerdekaan. Kekalahan Jepang mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk segera menyusun kekuatan. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan Kemerdekaan Indonesia yang disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Tanggal 18 Agustus 1945 selanjutnya sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI (Oktorino, 2016).

Berita Proklamasi di daerah Jawa Barat pertama kali diterima Kantor Berita Domei Bandung tanggal 17 Agustus 1945 dari kantor Berita *Domei* Pusat di Jakarta. Teks Proklamasi kemudian disebarluaskan melalui *Harian Tjahaja* dan melalui Radio Bandung

(*Bandung Hosokyoku*) yang menyiarkan secara terus menerus pada setiap kesempatan siaran, yaitu pukul 19.00, 20.00, dan 21.00 WIB.

Tanggal 19 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama memutuskan daerah Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang dipimpin oleh gubernur kemudian provinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur serta Residen selanjutnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) (Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1981).

PPKI secara bersamaan juga menetapkan pembentukan kementerian-kementerian yang akan dipimpin oleh seorang menteri. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur kedudukan komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan keadaan Pemerintahan Pusat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab administratif semua urusan lokal pada KNID yang bertujuan memperjelas pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, serta menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang menjadi daerah otonom.

KNID terutama sebagai perangkat pembantu gubernur berfungsi sebagai penghubung antara pusat dengan daerah, selain itu untuk membantu ketentraman dan menjaga keselamatan rakyat, anggota KNID ikut aktif menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerahnya masing-masing. Badan ini terutama menampung mereka yang pernah mendapatkan pendidikan militer, seperti para mantan anggota Peta, Heiho, dan KNIL.

Pemerintah dan rakyat Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi bentukan putusan PPKI membentuk barisan kelaskaran yang berbasis di beberapa kota seperti Bandung, Purwakarta, Serang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Sumedang, dengan berbagai nama kebanggaan masing-masing seperti Barisan Merah Putih, Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, dan Laskar Wanita untuk menghadapi kekuatan Jepang. Kalangan pemuda yang bekerja di instansi-instansi pemerintah membentuk Angkatan Muda Pos, Telegram, dan Telepon (AMPTT), Angkatan Muda Pekerjaan Umum (AMPU), serta dari kalangan pemuda Islam membentuk laskar Hizbullah dan Sabilillah (Voskuil, 2007).

Ibukota Provinsi Jawa Barat pada mulanya ditetapkan di Jakarta, namun dengan kedatangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia menyebabkan Jakarta menjadi kacau. Ibukota Provinsi Jawa Barat kemudian beralih ke Bandung dan Ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Guna memadukan potensi perjuangan bersenjata, pemerintah Republik Indonesia melebur berbagai barisan dan laskar bersenjata tersebut ke dalam satu wadah, yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Wadah perjuangan baru ini berdiri pada tanggal 5 Oktober 1945.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh para pemuda selanjutnya adalah mengambil alih kekuasaan dan melucuti orang-orang asing yang bersenjata. Para pemuda pada awalnya hanya berusaha mendatangi tangsi-tangsi dan gudang-gudang persenjataan Jepang untuk meminta senjata dengan tekad jika tidak diserahkan secara sukarela, maka mereka akan mengambil tindakan kekerasan. Tentara Jepang dalam keadaan terkepung tidak mempunyai pilihan kecuali menyerahkan senjatanya. Benturan fisik pun terkadang tidak dapat dihindari, seperti pertempuran yang terjadi di daerah Lengkong dan Kiaracandong.

KESIMPULAN

Di setiap masanya, perubahan sosial selalu dihadapi masyarakat Bandung dengan berbeda-beda cara. Seperti halnya pada masa Kekuasaan Belanda, kehidupan sosial yang dilalui masyarakat Bandung secara perlahan mengadaptasi beberapa kebudayaan yang dibawa oleh pihak Belanda. Hal ini tak terlepas dari lamanya masa pendudukan Belanda di wilayah Bandung. Perubahan Sosial di Bandung pada masa kekuasaan Belanda bisa dilihat dari bentuk arsitektur yang dimana pada awalnya Bandung merupakan sebuah perkampungan atau perdesaan yang dihuni oleh gubuk-gubuk kecil disekitarnya, Di zaman masa kekuasaan Belanda semua itu diubah dengan dibangunnya sebuah kota dengan dihiasi bangunan-bangunan permanen yang modern didalam kawasannya. Tak hanya dari segi arsitektur, perubahan sosial di zaman Belanda juga terlihat dari gaya berpakaian. Masyarakat Bandung yang pada awalnya menggunakan pakaian kebaya untuk wanita dan pangsi untuk pria, di zaman Belanda segelintir masyarakat mengubah gaya berpakaianya menggunakan gaun untuk wanita dan jas untuk pria. Namun sayangnya hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Bandung melainkan hanya dirasakan oleh para kaum elit saja kala itu.

Di tahun 1942 tepatnya saat Jepang masuk ke Bandung sayangnya semua itu berubah kembali, di sebagian kehidupan masyarakat Bandung tak ada lagi kata hidup modern yang glamor. Segala bentuk kehidupan bergaya Eropa dihapuskan oleh pemerintahan kedudukan Jepang kala itu. Berbagai bentuk kebijakan diterapkan oleh pemerintah kedudukan Jepang yang hampir keseluruhannya mengubah bentuk kehidupan sosial masyarakat Bandung. Kerja Paksa, kebijakan ekonomi yang tidak masuk akal, dan kebijakan lainnya yang membuat masyarakat Bandung semakin menderita membuat perubahan sosial yang cukup signifikan pada masa itu. Tetapi hal itu tidak berangsur lama karena di Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang di Jakarta. Masyarakat Bandung langsung memulai kembali menata

kehidupan sosialnya. Wilayah Bandung ditangan rakyatnya secara perlahan mulai dibangun lagi dari sektor politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya tanpa ada campur tangan dari pihak asing.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Benedict. 2018. Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Serpong: Marjin Kiri.
- Katam, Sudarsono. 2009. “Oud Bandoeng” Dalam Kartu Pos: Menjelang 200 Tahun Bandung. Jakarta: Khazanah Bahari.
- Katam, Sudarsono. 2010. Album Bandoeng Tempo Doeloe: Edisi 200 Tahun Bandung. Jakarta: Khazanah Bahari.
- Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.
- Kunto, Haryoto. 1986. Semerbak Bunga Di Bandung Raya. Bandung: Granesia.
- Kurasawa, Aiko. 2015. Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945. Depok: Komunitas Bambu.
- Kurasawa, Aiko. 2016. Masyarakat & Perang Asia Timur Raya: Sejarah Dengan Foto yang Tak Terceritakan. Depok: Komunitas Bambu.
- Kurasawa, Aiko. 2018. Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia: Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Oetari. 2015. Kereta Terakhir: Memoar Gadis Djoang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Okotorino, Nino. 2016. Di Bawah Matahari Terbit: Sejarah Pendudukan Jepang Di Indonesia 1941-1945. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Onghokham. 1987. Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, Aris. 2018. Masa Pendudukan Jepang. Kalimantan Barat: Derwita Press.
- Ricklefs, M. C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi Ilmu Alam Semesta.
- Salamah, S. Pd. 2017. Masa Pendudukan Belanda Di Indonesia. Yogyakarta: Maghza Pustaka.
- Smail, John R. W. 2011. Bandung Awal Revolusi 1945-1946. Depok: Ka Bandung.
- Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, Budi. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Voskuil, Robert, P.G.A. 2007. Bandung, Citra Sebuah Kota “Bandoeng, Beeld Van Een Stad. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Wiryawan, Ryzki.M. 2020. Pesona Sejarah Bandung “Bandung Hingga Awal Abad ke-20”. Garut: Layung.